



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	20 November 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	28	Article Size
Journalist	Fitri Sartina Dewi	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

Dana Infrastruktur Diminta Jadi Rp42 Triliun

JAKARTA—Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional dengan mengalokasikan dana pengalihan subsidi BBM untuk sektor infrastruktur menjadi lebih besar.

Fitri Sartina Dewi & Anggara Pernando
redaksi@bisnis.co.id

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan mengusulkan lagi tambahan dana Rp30 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan dan sanitasi.

Dia mengatakan Kementerian PU-Pera sebelumnya telah mengusulkan tambahan dana

Rp12 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pada tiga bidang yaitu irigasi, perumahan dan air bersih.

"Kemarin saya paparkan kepada Bappenas bahwa Rp12 triliun itu akan digunakan untuk infrastruktur dasar, tetapi Kepala Bappenas [Andrinof Chaniago] meminta supaya pembangunan jalan dan sanitasi juga dipercepat," katanya kepada *Bisnis*, (19/11/2014).

Dengan adanya usulan penambahan anggaran Rp30 triliun itu,

maka total anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian PU-Pera mencapai Rp42 triliun.

Keputusan mengenai diterima atau tidaknya penambahan anggaran infrastruktur senilai Rp42 triliun ini, sambungnya, akan dibahas pada rapat kabinet dan akan diketahui hasilnya dalam dua hari ke depan.

Berdasarkan penjelasannya, alasan pemerintah menambah usulan untuk pembangunan infrastruktur pada kedua sektor tersebut karena keduanya dinilai memiliki peran yang sangat penting.

"Jalan memiliki peran penting karena untuk konektivitas. Hal ini juga dilakukan sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menugaskan pembangunan jalan sepanjang 2.000 km selama lima tahun ke depan," tuturnya.

Untuk pembangunan sanitasi, sambungnya, usulan penambahan anggaran dilakukan untuk mencapai Milenium Development Goal's (MDG's) pada 2019 yaitu 100% akses sanitasi layak bagi masyarakat.

Basuki sebelumnya memaparkan perincian dana pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12 triliun. Dari total anggaran itu, dana sebesar Rp7 triliun rencananya digunakan untuk infrastruktur di bidang air bersih.

Di bidang perumahan, pemerintah akan mengalokasikan dananya sebesar Rp1 triliun. Adapun, untuk infrastruktur di sektor irigasi rencananya dialokasikan Rp4 triliun.

RAPAT MENTERI

Pada sisi lain, Basuki berencana mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil pada Kamis (20/11) untuk membahas tentang kelanjutan penerbitan peraturan presiden (perpres) terkait pemberian ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak penggenangan waduk Jatigede di Jawa Barat.

"Proyek ini sudah lama telantar, karena itu kami akan adakan pembahasan mengenai percepatan penerbitan perpres, karena alokasi anggaran pemberian ganti rugi kepada masyarakat di sana sudah kami sediakan," jelasnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan sebagai bukti keseriusan dari Pemerintahan Joko Widodo-Ju-

suf Kalla dalam mencapai visi dan misi di bidang kedaulatan pangan.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan menyelesaikan pemetaan lokasi (*zoning*) untuk memastikan kebutuhan lahan bagi program infrastruktur utama yang dijanjikan presiden dapat tersedia.

Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menuturkan pihaknya sudah meminta kementerian teknis menyerahkan rencana kerja kebutuhan lahan jangka menengah.

Program prioritas pemerintah yang membutuhkan lahan dalam jumlah luas adalah pelabuhan untuk tol laut termasuk rencana jalan aksesnya. Selain itu, kebutuhan lahan juga untuk pembangunan irigasi dan waduk untuk mendorong tercapainya swasembada pangan. Selain itu, lahan untuk jalan tol dan kereta api.

"Nanti, kami meminta [kebutuhan lahan] pada tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, kemudian para menteri terkait [3-4 orang] duduk bersama untuk langsung memutuskan [proses pengadaan tanah terintegrasi]," katanya di sela-sela Rakernas Nasional Real Estate Indonesia (REI), Rabu (19/11).

Menurutnya, kepatuhan terhadap tata ruang merupakan aspek yang akan dikedepankan oleh pemerintah. Dengan peruntukan yang terencana ini, maka proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak berhenti di tengah jalan atau mendapatkan masalah hukum.

"Ke depan izin kepemilikan tanah tidak boleh lagi menjadi sumber masalah," imbuhnya.

Menurut Ferry, birokrasi telah membuat sekat-sekat dalam pemerintahan. Dia mencontohkan petugas dari PT PLN juga membentuk tim untuk mengerjakan pembebasan lahan.

Pada hal, dengan menyerahkan kepada yang mampu membebaskan lahan, seharusnya proyek pembangkit yang direncanakan dapat lebih cepat terselesaikan. "Kami berkomitmen memecah kebuntuan," tambahnya.

Basuki Hadimuljono mengatakan kabinet kerja berfokus untuk melayani dan mempermudah masyarakat serta dunia usaha. "[Kalau ada regulasi yang menghambat] akan kita tabrak, yang penting sesuai dengan perizinan," katanya.



Indeksi dan Rincian Infrastruktur 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Ran. Irigasi	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Air Bersih	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Jalan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Sanitasi	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Waduk	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Bendungan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%
Ran. Bendungan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pemeliharaan dan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pembangunan baru	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, diolah

BISNIS/RADITYO EKO